

LAPORAN KINERJA
KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022



KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Kadur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kadur Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Kadur Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Kadur. Kinerja Kecamatan Kadur diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur tahun 2022.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Kadur tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Kadur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Kadur secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Februari 2022

CAMAT KADUR
MUHAMMAD JASIN, M.Si
Pembina TK I
NIP.19760502 199414 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2

 C. Isu Strategis Perangkat Daerah 4

 D. Landasan Hukum 5

 E. Sistematika 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

 A. Rencana Strategis 7

 B. Rencana Kinerja Tahun 2022..... 18

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

 A. Capaian Kinerja Organisasi 35

 B. Realisasi Anggaran 57

 C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 61

BAB IV PENUTUP 69

LAMPIRAN 72

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH 72

MATRIKS RENSTRA 72

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 72

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kadur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya .

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Kadur mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

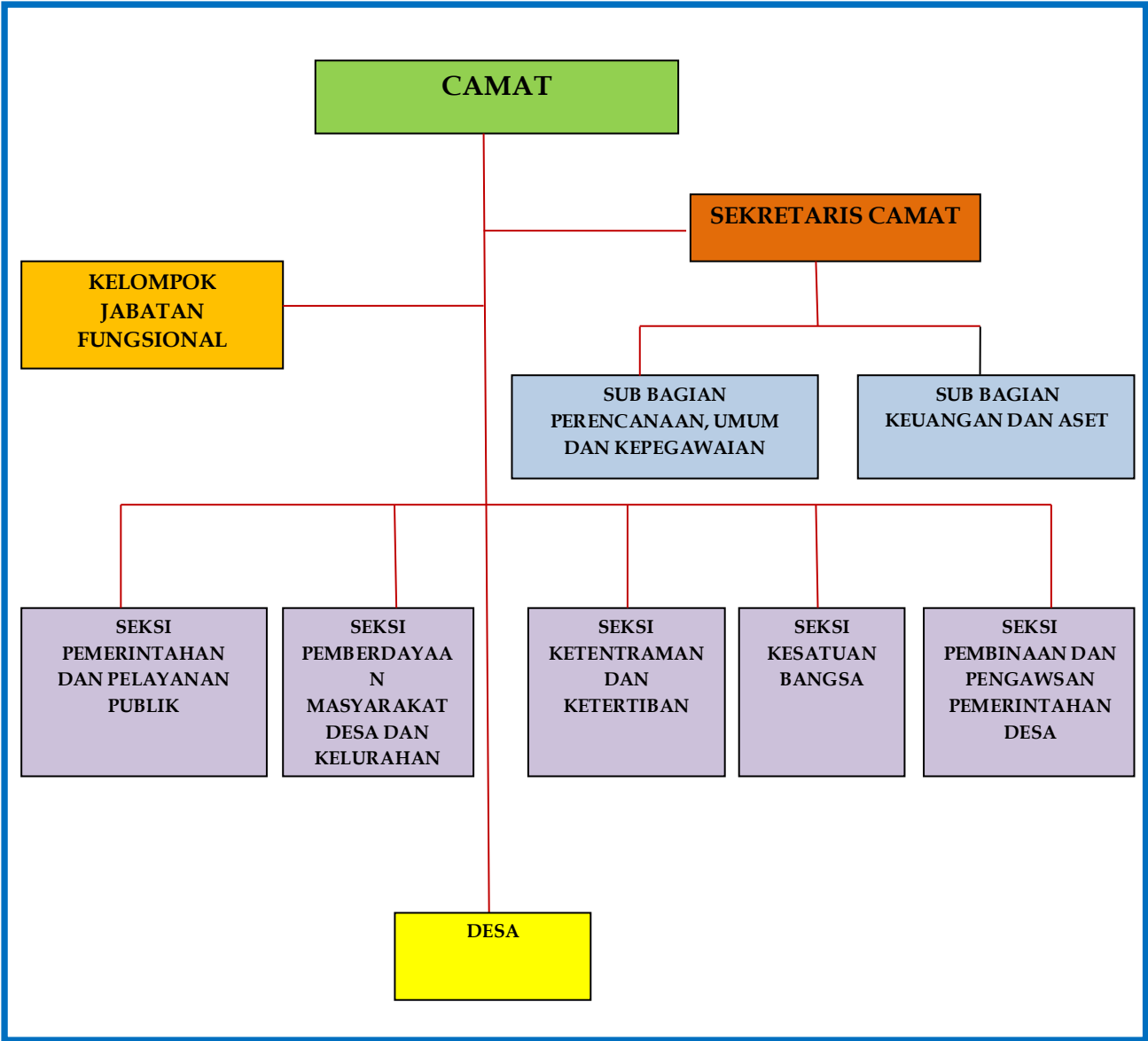
Peraturan Kepala Daerah;

- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Camat. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kadur periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government);
3. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif;
5. Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Kadur periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
3. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.

5. Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kadur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 adalah :

- | | |
|--------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu |

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
	Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Pemenihan Kualitas Infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan
5. Pengelolaan Potensi sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk mewujudkan Masyarakat Yang harmonis serta sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kadur mengacu pada Misi ke-3, yaitu : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
Sebelum Perubahan								
1.	Meningkatkan Efektivitas layanan administrasi dan Operasional perangkat daerah	Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Kinerja Unit	-	3,50	3,65	3,70	3,90
			Persentase kegiatan yang sesuai SOP	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Nilai Evaluasi Sakip	A	A	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan	Meningkatnya Kinerja	Indeks Pelayana	3.51	3,76	4,01	4,26	4,51

	Kecamatan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan	n Publik (IPP)					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72	74	76	78	80
Setelah Perubahan								
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan		Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	3,51	3,76	3,80	4,00	4,02
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	A	A	A	(A)	(A)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	80	82	85
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah	-	-	97 %	98 %	99 %

			kecamatan yang ditangani					
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	-	-	95 %	96 %	99 %
			Prosentase Desa yang telah dibina	-	-	98 %	99 %	100 %

Sumber : Renstra Kecamatan Kadur periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
Sebelum Perubahan							
1.	Meningkatkan efektivitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah	1.1.	Indeks kepuasan unit kerja	Indeks	Merupakan barometer keberhasilan atas pencapaian kinerja	Nilai per aspek - ----- x bobot per indikator 7 - Nilai per aspek = ΣNilai per indikator - Nilai Indeks = Σ(nilai aspek_n x bobot aspek_n)	Data Layanan
2	Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang	2.1	Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan yang Sesuai dengan SOP - ----- x 100% Jumlah Seluruh Kegiatan	SOP Kegiatan

	efektif dan efisien				Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
		2.2	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang system akuntabilitas kinerja instansi	Berdasarkan Nilai Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP	Inspektorat Kabupaten Pamekasan

					pemerintah		
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	3.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	Permenpan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Nilai F01 + nilai F02 + nilai F03 - ----- x bobot per indikator 3 - Nilai per aspek = Σ Nilai per indikator - Nilai Indeks = $\Sigma(\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$	Kementrian PAN dan RB
4	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan	Total Dari Nilai Pesepsi Per Unsur - ----- x Nilai Perimbang Total Unsur Yang Terisi IKM unit Pelayanan x 25	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

					Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		
Setelah Perubahan							
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	1.1.	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	Indeks	Permenpan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Nilai F01 + nilai F02 + nilai F03 - ----- -- x bobot per indikator 3 - Nilai per aspek = Σ Nilai per indikator - Nilai Indeks = Σ (nilai aspek_n x bobot aspek_n)	Kementrian PAN dan RB
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	2.1	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang system	Berdasarkan Nilai Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP	Inspektorat Kabupaten Pamekasan

					akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	$\frac{\text{Total Dari Nilai Pesepsi Per Unsur}}{\text{Nilai Perimbang Total Unsur Yang Terisi IKM unit Pelayanan} \times 25} \times$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	2.3	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	%	Permendagri NO. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi}}{\text{jumlah seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100\%$	Laporan/Dok umen Trantib

4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	2.4	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	%	UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa	$\frac{\text{Jumlah desa/Kelurahan yang masyarakatnya diberdayakan}}{\text{Jumlah total desa /Kelurahan di wilayah kecamatan}} \times 100 \%$	Laporan/Dokumen Trantib
		2.5	Prosentase Desa yang telah dibina	%	United Nation Development Program (UNDP)	$\frac{\text{Jumlah desa yang telah dibina}}{\text{Jumlah total desa di wilayah kecamatan}} \times 100 \%$	Laporan/Dokumen Trantib

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur Tahun 20xx

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	Indeks	4,01
	1.1 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	81,00(A)
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,80
	1.3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	Persen	95%
	1.4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	Persen	96 %
		Prosentase Desa	Persen	98 %

			yang telah dibina		
--	--	--	-------------------	--	--

Sumber : Rencana Kerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Pamekasan tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	1.	Nilai Evaluasi Sakip	Angka	91,00 (A)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1	Persentase jenis Pelayanan yang dilaksanakan secara berkualitas	persen	94 %
		2.2	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	persen	94 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3.1	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	persen	97 %

			yang ditangani		
		3.2	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	persen	97 %
		3.3	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	persen	97 %
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	4.1	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	persen	95 %
		4.2	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	persen	95 %
		4.3	Prosentase Desa yang telah dibina	persen	98 %
		4.4	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	persen	98 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kadur:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Kadur Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
07.01.1	2	3	4	5
07.01.1.201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%	2.327.255.572
07.01.1.201.1		Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat	76%	33.000.000

07.01.1	Perencanaan,	waktu		
.201.2	Penganggaran, dan	Jumlah dokumen	3	29.000.000
07.01.1	Evaluasi Kinerja	perencanaan perangkat	Doku	
.202	Perangkat Daerah	daerah yang tersusun	men	
	Penyusunan Dokumen			4.000.000
	Perencanaan Perangkat			
	Daerah	Jumlah dokumen RKA yang	36	
	Koordinasi dan	tersusun	Doku	
	Penyusunan Dokumen		men	
	RKA- SKPD			
07.01.1	Administrasi Keuangan	Jumlah unit kerja yang		1.777.272.97
.202.1	Perangkat Daerah	menyusun perencanaan dan	1 Unit	2
		laporan kinerja keuangan		
		dengan kualitas baik		
07.01.1	Penyediaan Gaji dan	Jumlah ASN yang menerima	14 Kali	1.743.372.97
.202.3	Tunjangan ASN			2
07.01.1	Pelaksanaan	Jumlah penatausahaan dan	6	33.900.000
.205	Penatausahaan dan	Pengujian/Verifikasi	Verifik	
	Pengujian/Verifikasi	Keuangan SKPD	asi	
	Keuangan SKPD			
07.01.1	Administrasi	Jumlah ASN yang terfasilitasi	8 ASN	30.000.000
.205.9	Kepegawaian Perangkat			
	Daerah			
07.01.1	Pendidikan dan	Jumlah pegawai yang		30.000.000
.206	Pelatihan Pegawai	mendapatkan pendidikan	22	
	Berdasarkan Tugas dan	dan pelatihan berdasarkan	ASN	
	Fungsi	tugas dan fungsi		
07.01.1	Administrasi Umum	Jumlah sarana yang layak	32	64.000.000
.206.1	Perangkat Daerah	fungsi	Sarana	
07.01.1	Penyediaan Komponen	Jumlah Komponen Instalasi	15	4.000.000
	Instalasi	Listrik/Penerangan	Komp	

.206.2	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang disediakan	onen	
07.01.1 .206.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Peralatan	40.000.000
07.01.1 .208	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun	1 Sistem	20.000.000
07.01.1 .208.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	12 Jasa	190.000.000
07.01.1 .208.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	2 Jasa	10.000.000
07.01.1 .209	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Jasa	180.000.000
07.01.1 .209.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	232.982.600
07.01.1 .209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1Unit	14.990.000
07.01.1 .209.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	15.000.000

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
07.01.1.207	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit	202.992.600
07.01.1.207.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	0 Unit	0
7.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	0 Unit	0
7.1.2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	99%	98.000.000
7.1.2.2.01.2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai dengan SPM	99 %	33.000.000
7.1.2.2.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang berjalan efektif	5 Kegiatan	93.000.000
7.1.2.2.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1	1%	5.000.000

	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.1.5	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	4 Kegiatan	593.116.400
7.1.5.2 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	99%	95.000.000
7.1.5.2 01.8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase lembaga masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	99%	95.000.000
7.1.6	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas forum koordinasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Koordi nasi	95.000.000
7.1.6.2 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang	99%	50.000.000

7.1.6.2 01.3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	99%	50.000.000
7.1.6.2 01.17	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	10 Desa	20.000.000
07.01.1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan desa yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	10 Desa	30.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Pada tanggal 2 bulan November tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5

1.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	1.1	Nilai Evaluasi Sakip	Angka	91,00 (A)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	94 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3.1	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	Persen	97 %
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	4.1	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	Persen	95 %
		4.2	Prosentase Desa yang telah dibina	Persen	98 %

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kadur Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
07.01.1	2	3	4	5
07.01.1 .201 07.01.1 .201.1 07.01.1 .201.2 07.01.1 .202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%	2.299.411.688,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	76%	33.000.000,00
	Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	29.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	36 Dokumen	4.000.000,00

	RKA- SKPD			
07.01.1 .202.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit	1.587.050.56 8,00
07.01.1 .202.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima	14 Kali	1.557.350.56 8,00
07.01.1 .205	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Verifik asi	29.700.000,0 0
07.01.1 .205.9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	8 ASN	30.000.000,0 0
07.01.1 .206	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	22 ASN	30.000.000,0 0
07.01.1 .206.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	32 Sarana	69.197.010,0 0
07.01.1 .206.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Komp onen	4.000.000,00
07.01.1 .206.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Peralat an	45.197.010,0 0
07.01.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang	1	20.000.000,0

.208	Berbasis Elektronik pada SKPD	dibangun	Sistem	0
07.01.1 .208.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	12 Jasa	129.612.000,00
07.01.1 .208.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	2 Jasa	10.000.000,00
07.01.1 .209	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Jasa	119.612.000,00
07.01.1 .209.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	99.429.800,00
07.01.1 .209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1Unit	24.990.000,00
07.01.1 .209.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	25.000.000,00
07.01.1 .207	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit	49.439.800,00
07.01.1	Pengadaan Barang Milik	1	1 Unit	

.207.2	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			351.122.310,00
7.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1 Unit	351.122.310,00
7.1.2.2 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	99%	25.000.000,00
7.1.2.2 01.2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai dengan SPM	99 %	20.000.000,00
7.1.2.2 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang berjalan efektif	5 Kegiatan	20.000.000,00
7.1.2.2 02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1	1%	5.000.000,00
7.1.3	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	1%	5.000.000,00
7.1.3.2 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96%	40.000.000,00

	DAN KELURAHAN			
7.1.3.2 01.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinsi kegiatan pemberdayaan desa	99%	40.000.000,0 0
7.1.3.2 01.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipaasi kelompok masyarakat desa dalam forum Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1%	20.000.000,0 0
7.1.4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1%	20.000.000,0 0
7.1.4.2 01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	96%	600.860.867, 00
7.1.4.2 01.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang dilaksanakan	99%	600.860.867, 00
7.1.4.2 01.2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas/ koordinasi yang diselenggarakan	3 Koordi nasi	15.000.000,0 0
7.1.5	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	4 Kegiat an	585.860.867, 00

7.1.5.2 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	99%	60.000.000,0 0
7.1.5.2 01.8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase lembaga masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pemnbinaan mengenai wawasan kebangsaan	99%	60.000.000,0 0
7.1.6	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas forum koordinasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Koordi nasi	60.000.000,0 0
7.1.6.2 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik	99%	32.030.750,0 0
7.1.6.2 01.3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	99%	32.030.750,0 0

	Pemerintahan Desa			
7.1.6.2 01.17	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	10 Desa	15.000.000,0 0
07.01.1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan desa yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	10 Desa	17.030.750,0 0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kadur Tahun 2022

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	Realisa si	Capaia n %	Kategori	Sumber Data
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	4,26	3,61	84,7 %	Cukup	Kementeria n PANRB
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	81,30 (A)	80,20 (A)	99 %	Sangat Baik	LHE SAKIP Tahun 2022
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,80	3,80	100 %	Baik	Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022
4.	Meningkatnya Ketentraman	Persentase Ketentraman dan	85 %	81 %	95 %	Cukup	Evaluasi Renja 2022

	dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani					
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	88 %	86 %	97 %	Cukup	Evaluasi Renja 2022
		Prosentase Desa yang telah dibina	80 %	73 %	93 %	Cukup	Evaluasi Renja 2022

Indeks pelayanan publik pada tahun 2022 di targetkan sebesar 4,01 dengan realisasi kinerja sebesar N/A dan capaian kinerja sebesar N/A atau katagori N/A target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punshment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menunjukkan kategori peringkat A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 81,30 dan capaian kinerja sebesar 100.09 % atau kategori Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,80 dengan angka Indeks sebesar 3,80 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Baik.Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani dengan Target 2022 sebesar 85 %, Realisasi sebesar 80 %dan

capaian kinerja sebesar 95 % atau kategori cukup. Sedangkan untuk Indikator Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan dengan Target 2022 sebesar 88 %, Realisasi sebesar 86 % dan capaian kinerja sebesar 97 % atau kategori cukup.

Indikator Kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan Target 2022 sebesar 80 %, Realisasi sebesar 73 % dan capaian kinerja sebesar 93 % atau kategori cukup. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

N o.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Targe t	Real isasi	% Capa ian	Tar get	Rea lisa si	% Cap aian
Sebelum Perubahan								
1	Meningkatkan efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah	Indeks kepuasan unit kerja	3,50	3,519	100,54 %			
2.	Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efesien.	Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP	90%	90,72 %	100,80 %			
		Nilai Hasil Evaluasi Sakip	81 (A)	81,23 (A)	100,28 %			
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,76	-	-			
4.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,75	3,75	100 %			

Setelah Perubahan								
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)				4,26	3,62	84,7 %
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip				81,30(A)	81,38 (A)	100,09%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				3,80	3,80	100 %
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani				85 %	81 %	95 %
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan				88 %	86 %	97 %
		Prosentase Desa yang telah dibina				80 %	73 %	93 %

Hasil Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 81 (A), dengan realisasi kinerja 81,23 (A) dan capaian kinerja sebesar 100,28% atau kategori Sangat Baik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 81,30 (A), dan capaian kinerja sebesar 100,09 % atau kategori Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan pada tahun 2021 ditargetkan 3,75 dengan realisasi sebesar 3,75 dan capaian kinerja sebesar 100% atau katagori baik. Sementara pada tahun 2022 target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,80 dengan realisasi sebesar 3,80 dan Capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori baik.

Untuk indikator kinerja pada tahun 2022 ada perubahan nomenklatur sesuai dengan permendagri 90 tahun 2020. Sehingga indikator yang digunakan berubah tidak sama dengan indikator pada tahun 2021. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	4,01	4,51	88,91 %
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	80,10 (A)	81,00 (A)	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,80	3,87	90 %
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di	97 %	99 %	97,98 %

		wilayah kecamatan yang ditangani			
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	95 %	96 %	98,96 %
		Prosentase Desa yang telah dibina	98 %	98 %	100 %

1. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan dengan indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) capaian pada tahun 2022 adalah NA sedangkan target akhir 2023 adalah 4,51 sehingga tingkat kemajuan juga NA.
2. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja Indeks Nilai Evaluasi Sakip tingkat kemajuan Sebesar 99,97 %.
3. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian pada tahun 2021 3,80 sedangkan target akhir 2023 adalah 3,87 sehingga tingkat kemajuan juga 95%.
4. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan indikator Kinerja Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani , dengan capaian pada tahun 2022 95% sedangkan target akhir 2023 adalah 100% sehingga tingkat kemajuan juga 95%.

5. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan dengan indikator Kinerja Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan, dengan capaian pada tahun 2022 97% sedangkan target akhir 2023 adalah 100% sehingga tingkat kemajuan juga 97%, sedangkan untuk indikator kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan capaian pada tahun 2022 93% sedangkan target akhir 2023 adalah 100% sehingga tingkat kemajuan juga 93%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	4,26	3,61	84,7 %
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	80,10 (A)	75	108,51 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,80	3,00	126,6 %
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	81 %	-	-

5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	86 %	-	-
		Prosentase Desa yang telah dibina	73 %	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan , disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	Rea lisas i	% Cap aian	Analisis Keberhasilan/K egagalan	Solusi yang dilaku kan
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	4,26	3,61	84,7 %	Berhasil karena adanya pelayanan masyarakat yang meningkat	Memp ertaha nkan/t erus melak ukan pelaya nan yang terbaik
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	81,30(A)	80,2 0 (A)	100, 09%	Berhasil karena adanya Dokumen SAKIP yang selaras	Memp ertaha nkan/t erus melen gkapi Doku men Sakip berdas arkan di LHE
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan	3,80	3,80	100 %	Berhasil karena adanya Kinerja aparatur dan dukungan	Memp ertaha nkan/ Menin

	Publik Kecamatan	Masyarakat (IKM)				partisipasi masyarakat	gkatka n kualita s Pelaya nan
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	85 %	81 %	95 %	Gagal , karena Ada pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) sejak awal triwulan I tahun 2021, berdampak terjadi pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melaluiefisiensi dan refocusing anggaran.	Akan dilanju tkan pada tahun Selanju tnya
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	88 %	86 %	97 %	Gagal , karena Ada pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) sejak awal triwulan I tahun 2021, berdampak terjadi pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melaluiefisiensi dan refocusing anggaran.	Akan dilanju tkan pada tahun selanju tnya
		Prosentase Desa yang telah dibina	80 %	73 %	93 %	Gagal , karena Ada pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) sejak awal triwulan I tahun 2021, berdampak terjadi pergeseran target kinerja	Akan dilanju tkan pada tahun selanju tnya

						dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan refocusing anggaran.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel di atas Pada Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menunjukkan kategori peringkat A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 81,38. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,80 dengan angka Indeks sebesar 3,80 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	NA	Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	0,8 %	Tidak menunjang

	publik yang berkualitas di wilayah kecamatan						
2.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	3,81 (A)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	0,8 %	Tidak menu njang
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	0,8 %	Tidak menu njang
					Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	0,8 %	Tidak menu njang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	50 %	Tidak Menu njang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	75 %	Menu njang
				Administrasi Keuangan	Jumlah unit kerja yang	100 %	Menu njang

				Perangkat Daerah	menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaam gaji dan tunjangan	100 %	Menu njang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	Menu njang
S				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	73 %	Men unja ng
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	73 %	Menu njang

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	10 0 %	Men unja ng
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 0 %	Menu njang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	10 0 %	Men unja ng
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang disediakan	10 0 %	Menu njang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	49 %	Tidak Menu njang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 0 %	Menu njang

				Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggaraka n	75 %	Menu njang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	28 %	Tida k menu njang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10 0 %	Menu njang
				Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	10 0 %	Menu njang
				Pemeliharaan/R ehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana	86 %	Menu njang

				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi		
3.	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<i>100 %</i>				<i>Menu njang</i>
				Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	100 %	Men unja ng
				Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %	Men unja ng
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Kegiatan Pemerintahan kecamatan	27 %	Tidak Menu nnjan g

				Tingkat Kecamatan	yang efektif		
				Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarak an	10 0 %	Men unja ng
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	10 0 %	Menu njang
4.	Meningkatn ya Pemberdaya an Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan	Persentas e Masyara kat Desa/Kel urahan yang telah diberday akan	100 %				Menu njang
				Program	Persentase	10	Men

				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	0 %	unjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	Menjang
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok Masyarakat Desa dalam Forum Musrenbangdes	100 %	Menujang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya.	67 %	Tidak Menujang
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan	83 %	Menjang

					n Desa		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok Masyarakat kelurahan dalam Forum Musrenbangdes	100 %	Menu njang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terfasilitasi	75 %	Men unja ng
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	100 %				Menu njang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah	100 %	

				Umum	Kecamatan yang ditindaklanjuti		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi	100 %	Men unja ng
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas /koordinasi yang diselenggaraka n	33 %	Tidak Menu njang
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan harmonisasi yang diselenggaraka n	100 %	Menu njang
				Program penyelenggaraa	Persentase fasilitasi	100 %	Tida k Men unja

				n Urusan Pemerintahan Umum	penyelenggara an urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik		ng
				Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurah an yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	10 0 %	Tida k Men unja ng
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	27 %	Tidak Menu njang
6.	<i>Meningkatn ya Pemberdaya an Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i>	<i>Prosentase Desa yang telah dibina</i>	100 %				<i>Menu njang</i>
				Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase desa yang menyelenggar	10 0 %	Men unja ng

				Pemerintahan Desa	akan pemerintahan desa dengan baik		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggara an pemerintahan Desa	10 0 %	Men unja ng
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	10 0 %	Menu njang

Dari tabel di atas menunjukkan 5 Program mengalami keberhasilan dan kegagalan sebanyak 1 Program dan 76 dan 230 Sub Kegiatan. Sebanyak 75 Kegiatan diantaranya menunjukkan keberhasilan sementara sisanya sebanyak 1 kegiatan mengalami kegagalan disebabkan terdapat dana PAK (berbentuk pekerjaan fisik) yang diterima pada triwulan ke empat sehingga menyebabkan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan kurang sehingga pekerjaan pembangunan /kontruksi masih dalam proses pekerjaan dan juga refocusing anggaran covid-19. Adapun faktor -faktor yang mempengaruhi program keberhasilan sebagai berikut :

- A. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta penggalian dan pengelolaan sumber potensi Desa/Kelurahan

- Mengadakan Penyuluhan dan Intensifikasi PBB ke desa-desa guna pelunasan PBB yang tepat waktu;
- B. Adanya koordinasi dan fasilitasi bersama dengan instansi sektoral dan para muspika serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mensosialisasikan dan mengevaluasi program pemerintah khususnya di Kecamatan Kadur sehingga tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
- C. Melakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dan kelembagaan di SKPD Kabupaten Pamekasan melalui dukungan dari pimpinan informal atau tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk ikut aktif memotivasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan; Sedangkan untuk solusi terkait program atau kegiatan yang mengalami kegagalan atau tidak berhasil adalah bahwa kegiatan tersebut akan di anggarkan pada tahun selanjutnya

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1.	Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.519.923.251	5.282.520.877	96 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,294,000	36,294,000	100%
7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,294,000	36,294,000	100 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.264.223.296	3.105.748.158	95 %

7.01.01.2.0 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,124,223,296	2.985.748.158	96 %
7.01.01.2.0 2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34,400,000	34,400,000	100 %
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.026.000	24.026.000	100%
7.01.01.2.0 5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.026.000	24.026.000	100 %
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.829.930.205	1.793.633.888	98 %
7.01.01.2.0 8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.680.000	10.860.000	100 %
7.01.01.2.0 8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,440,000	28.315.750	100 %
7.01.01.2.0 8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,050,000	36.050.000	100%
7.01.01.2.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.800.000	241.800.000	100 %
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.820.000	140.869.151	95 %
7.01.01.2.0 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100%
7.01.01.2.0 6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	20.540.000	98 %
7.01.01.2.0 6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,500,000	16,500,000	100%
7.01.01.2.0 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	22.871.901	76%
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.681.250	181.949.680	86%
7.01.01.2.0 9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	64,301,000	64.301.000	100%

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
7.01.01.2.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,239,000	16,239,000	100%
7.01.01.2.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,080,000	7.880.000	98%
II	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</i>	553.240.100	55.514.000	97%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000	55.514.000	97%
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%
7.01.02.2.0 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	47.306.000	45.514.000	94%
7.01.02.2.0 2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	30.000.000	100%
II	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i>	13.325.832.8 16	12.316.474.6 76	74%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.325.832.8 16	12.316.474.6 76	93%
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000	40.000.000	100%
7.01.03.2.0 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	10.000.000	10.000.000	100%

	Perencanaan Pembangunan di Desa			
7.01.03.2.0 1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,000,000	30,000,000	100%
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.849.051.64 1	9.716.545.24 1	99%
7.01.03.2.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100%
7.01.03.2.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.431.981.17 5	2.559.929.43 5	75%
III	<i>Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</i>	213.340.000	168.050.000	79%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	198.340.000	153.050.000	77%
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	198.340.000	153.050.000	77%
7.01.04.2.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.390.000	36.830.000	94%
7.01.04.2.0 1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	159.010.000	116.220.000	73%
7.01.05	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.000.000	15.000.000	100%
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	15.000.000	100%
7.01.05.2.0 1.5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	15.000.000	15.000.000	100%

	Undangan			
II	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i>	40.000.000	33.223.000	73 %
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	33.223.000	73 %
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	33.223.000	73 %
7.01.06.2.0 1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	40,000,000	33.223.000	73 %

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	4,01	-	-	22.853.583.242	17.853.568.553	
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,30(A)	-	-	5.519.923.251	5.280.306.877	

3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	3,80	3,80	100%	57.306.000	55.514.000	
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	85%	81%	95%	213.340.000	168.050.000	
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	88%	86%	97%	16.753.013.991	12.316.474.676	
		80%	75%	93%	40.000.000	33.223.000	

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan analisi efisien dan efektifitas anggaran adalah untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No .	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Ti ng kat Efi sie nsi
		Target	Realis asi	% Ca pai an	Anggara n	Realisasi	% Ca pai an	
					(Rp.)	(Rp.)		

1.	Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81,30(A)	80,10(A)	99%	2.299.411.688	2.101.666.471	91%	9%
7.0	Perencanaan,	6	6	100%				
1.0	Penganggaran, dan				33.000.000	24.570.000	74%	26%
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
.01								
7.0	Penyusunan Dokumen	6	6	100%				
1.0	Perencanaan Perangkat							
1.2	Daerah				29.000.000	20.570.000	71%	29%
.01								
.1								
7.0	Administrasi Keuangan	1	1	100%				
1.0	Perangkat Daerah							
1.2					4.000.000	4.000.000	100%	0%
.02								
7.0	Penyediaan Gaji dan	12	12	100%				
1.0	Tunjangan ASN							
1.2					1.587.050.568	1.483.239.651	93%	7%
.02								
.1								
7.0	Pelaksanaan Penatausahaan	6	6	100%				
1.0	dan Pengujian/Verifikasi							
1.2	Keuangan SKPD				1.557.350.568	1.455.039.651	93%	7%
.02								
.3								
7.0	Administrasi Kepegawaian	16	16	94%				
1.0	Perangkat Daerah				29.700.000	28.200.000	95%	5%
1.2								
.05								
7.0	Pendidikan dan Pelatihan	16	16	94%				
1.0	Pegawai Berdasarkan Tugas							
1.2	dan Fungsi				30.000.000	24.250.000	81%	19%
.05								
.2								
7.0	Penyediaan Jasa Penunjang	212	212	100%		24.250.000	81%	19%

1.0	Urusan Pemerintahan				30.000.00	0		
1.2	Daerah				0			
.08								
7.0	Penyediaan Jasa Surat	500	500	100%				
1.0	Menyurat							
1.2					69.197.01	67.407.82	97%	3%
.08					0	0		
.1								
7.0	Penyediaan Jasa	3	3	100%				
1.0	Komunikasi, Sumber Daya						10	
1.2	Air dan Listrik						0%	0%
.08					4.000.000	4.000.000		
.2								
7.0	Penyediaan Jasa Peralatan	12	12	100%				
1.0	dan Perlengkapan Kantor							
1.2					45.197.01	44.089.62	98%	2%
.08					0	0		
.3								
7.0	Penyediaan Jasa Pelayanan	17	17	100%				
1.0	Umum Kantor							
1.2					20.000.00	19.318.20	97%	3%
.08					0	0		
.4								
7.0	Administrasi Umum	70	65	93%				
1.0	Perangkat Daerah				129.612.0	117.992.2	91%	9%
1.2					00	00		
.06								
7.0	Penyediaan Komponen	7	7	100%				
1.0	Instalasi							
1.2	Listrik/Penerangan				10.000.00	5.981.200	60%	40%
.06	Bangunan Kantor				0			
.1								
7.0	Penyediaan Bahan Logistik	200	196	98%				
1.0	Kantor				119.612.0	112.011.0	94%	6%
1.2					00	00		

.06 .4								
7.0 1.0 1.2 .06 .5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500	500	100%		99.429.80 0	99.206.80 0	100% 0%
7.0 1.0 1.2 .06 .9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	3	75%		24.990.00 0	24.990.00 0	100% 0%
7.0 1.0 1.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65	61	94%		25.000.00 0	24.850.00 0	99% 1%
7.0 1.0 1.2 .09 .2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	100%		49.439.80 0	49.366.80 0	100% 0%
7.0 1.0 1.2 .09 .9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100%		351.122.3 10	285.000.0 00	81% 19%
7.0 1.0 1.2 .09 .9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	6	100%		351.122.3 10	285.000.0 00	81% 19%
7.0 1.0 2 7.0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi	100%	95%	95%		25.000.00 0	23.000.00 0	92% 8%
		100%	100%	10				90 10

1.0	Penyelenggaraan Kegiatan			0%	20.000.00	18.000.00	%	%
2.2	Pemerintahan di Tingkat				0	0		
.01	Kecamatan							
7.0	Peningkatan Efektifitas	3	3	10				
1.0	Kegiatan Pemerintahan di			0%				
2.2	Tingkat Kecamatan				20.000.00	18.000.00	90	10
.01					0	0	%	%
.2								
7.0	Penyelenggaraan Urusan	100%	94%	94				
1.0	Pemerintahan yang tidak			%				
2.2	Dilaksanakan oleh Unit				5.000.000	5.000.000	10	0%
.02	Kerja Perangkat Daerah						0%	
	yang ada di Kecamatan							
7.0	Peningkatan Efektifitas	21	21	10				
1.0	Pelaksanaan Pelayanan			0%				
2.2	kepada Masyarakat di				5.000.000	5.000.000	10	0%
.02	Wilayah Kecamatan						0%	
.3								
'7.	Program Pemberdayaan	88%	86%	98				
01.	Masyarakat Desa dan			%	40.000.00	40.000.00	10	0%
03	Kelurahan				0	0	0%	
7.0	Koordinasi Kegiatan	77,77%	77,77%	10				
1.0	Pemberdayaan Desa			0%	40.000.00	40.000.00	10	0%
3.2					0	0	0%	
.01								
7.0	Peningkatan Partisipasi	9	9	10				
1.0	Masyarakat dalam Forum			0%				
3.2	Musyawarah Perencanaan				20.000.00	20.000.00	10	0%
.01	Pembangunan di Desa				0	0	0%	
.1								
7.0	Peningkatan Efektifitas	20	20	10				
1.0	Kegiatan Pemberdayaan			0%				
3.2	Masyarakat di Wilayah				20.000.00	20.000.00	10	0%
.01	Kecamatan				0	0	0%	
.3								

7.0	Koordinasi dan	83,33%	80%	96%				
1.0	Sinkronisasi							
3.2	Pemberlakuan Pembatasan				600.860.8	538.692.5	90%	10%
.05	Kegiatan Masyarakat (PPKM)				67	00		
'7.	Program Koordinasi	85%	81%	95%				
01.	Ketentraman dan				600.860.8	538.692.5	90%	10%
04	Ketertiban Umum				67	00		
7.0	Koordinasi Upaya	85%	81%	95%				
1.0	Penyelenggaraan				15.000.00	14.755.00	98%	2%
4.2	Ketenteraman dan				0	0		
.01	Ketertiban Umum							
7.0	Sinergitas dengan	4	4	100				
1.0	Kepolisian Negara Republik							
4.2	Indonesia, Tentara Nasional				585.860.8	523.937.5	89%	11%
.01	Indonesia dan Instansi				67	00		
.1	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.0	Harmonisasi Hubungan	8	7	88%				
1.0	Dengan Tokoh Agama dan				60.000.00	56.396.00	94%	6%
4.2	Tokoh Masyarakat				0	0		
.01								
.1								
7.0	Program penyelenggaraan	85%	85%	100%	60.000.00	56.396.00	94%	6%
1.0	Urusan Pemerintahan				0	0		
5	Umum							
7.0	Penyelenggaraan Urusan	85%	85%	100%	60.000.00	56.396.00	94%	6%
1.0	Pemerintahan Umum				0	0		
5.2	sesuai Penugasan Kepala							
.01	Daerah							
7.0	Penanganan Konflik Sosial	3	3	100%				
1.0	sesuai Ketentuan Peraturan				32.030.75	31.987.75	100%	0%
5.2	Perundang-Undangan				0	0		
.01								
.5								

7.0 1.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	73%	91%	32.030.75 0	31.987.75 0	10 0%	0%
7.0 1.0 6.2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	73%	91%	15.000.00 0	14.957.00 0	10 0%	0%
7.0 1.0 6.2 .01 .6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	5	10 0%	17.030.75 0	17.030.75 0	10 0%	0%

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian kinerja program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Kecamatan Kadur anggaran tahun 2022 dalam menjalankan aktifitasnya tingkat efisiensi sebanyak 6 program dengan 67 kegiatan 230 Sub Kegiatan dengan total efisiensi 9,59 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2022. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan dengan Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP) dengan capaian kinerja sebesar N/A% (kategori N/A)
- Sasaran 1, Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Sakip dengan capaian kinerja sebesar 100,09 % (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)
- Sasaran 3, Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 95% (kategori Cukup)

- Sasaran 4 terdiri dari 2, yang Pertama Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan dengan capaian kinerja sebesar 97% (kategori Cukup)
- Sasaran 4 yang kedua, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan dengan indikator kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan capaian kinerja sebesar 93% (kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.350.439.513 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.101.666.471 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 98% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 99%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Kekurangan yang terjadi selama 2022 ini menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Februari 2022

 **CAMAT KADUR**
MOHAMMAD JASIN, M.Si
Pembina TK I
NIP.19760502 199414 1 002

Lampiran

2. Matriks Renstra 2018-2023 dan Perubahannya;
3. Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya;
4. Matriks Renja 2022 dan Perubahannya;
5. PK Kepala PD dan Perubahannya;
6. Laporan Evalauasi Hasil Renja s.d. TW. IV;
7. Penghargaan yang pernah diperoleh oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya.